

## BAB II

### STRATEGI DAKWAH DAN DERADIKALISASI AGAMA

#### 2.1. Konsep Dasar Strategi Dakwah

Strategi pada mulanya merupakan suatu istilah yang diadopsi dari kalangan militer, yang merujuk pada penggunaan dan pemanfaatan dana, daya dan peralatan yang tersedia untuk memenangkan pertempuran. Akan tetapi dewasa ini sesuai dengan perkembangan kehidupan pada abad modern, istilah tersebut ternyata tidak hanya digunakan dalam istilah militer saja, akan tetapi juga digunakan oleh berbagai organisasi non militer tak terkecuali di dalamnya yaitu organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama' (NU) di dalam pengembangan dakwahnya.

Hal tersebut tiada lain dikarenakan dakwah merupakan suatu aktifitas untuk mengajak manusia menuju suatu tujuan,<sup>36</sup> yang dalam hal ini tujuan tersebut tiada lain yaitu menuju ke jalan Allah. Esensi tersebut tertuang dalam firman Allah surat An-Nahl ayat: 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِآيَاتِ هِيَ  
أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

---

<sup>36</sup> Tujuan tersebut yang kemudian digaris bawahi oleh M. Ridlo Syabibi, agar apa yang menjadi tujuan dari aktifitas dakwah dapat diterima secara efektif dan efisien mutlak diperlukan kiat-kiat dan strategi khusus. Hal inilah yang olehnya dinamakan strategi dakwah. Baca: M. Ridlo Syabibi, *Metodologi Ilmu Dakwah; Kajian Ontologis Dakwah Ikhwan Al-Safa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm.135

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.* (An-Nahl ayat: 125)

Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa di dalamnya juga memuat metodologi atau cara-cara yang harus kita terapkan dalam melaksanakan suatu aktifitas dakwah, yang tentunya harus disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan zaman (*sholih fi kulli zaman wa al-makan*). Dengan kata lain, konsepsi tentang dakwah atau menyeru kejalan Allah seperti yang tersebut dalam ayat di atas mengindikasikan, bahwa kewajiban dakwah harus mempertimbangkan berbagai cara ataupun strategi yang ditempuh dengan tanpa mengabaikan kondisi *mad'u* (objek dakwah).<sup>37</sup>

Seiring dengan berkembangnya dunia sekarang ini dengan segala dinamika yang ada, maka setiap organisasi yang berorientasi pada pengembangan dakwah Islam, dituntut pula untuk dapat merumuskan suatu strategi dan penerapannya. Di sisi lain juga dituntut untuk mampu berbenah diri dalam menyiasati dakwahnya, agar apa yang menjadi pesan *syar'i* dapat diterima oleh *mad'u* (objek dakwah). Tak terkecuali dalam organisasi yang profit (nirlaba), organisasi dakwah pun jika menginginkan dapat tetap eksis dan *survive*, maka ia harus mampu menentukan setiap arah kebijakan dan menerapkan strategi yang tepat untuk menjalankan visi dan misinya, serta

---

<sup>37</sup> Kewajiban melaksanakan dakwah dengan pola-pola seperti *hikmah*, *mau'idzoh hasanah* dan *mujadalah* yaitu disebut dengan pola-pola dakwah yang mempertimbangkan keadaan objek dakwah yang oleh Ahmad Anas disebut dengan pendekatan dakwah yang mengacu pada *human relation*. Lihat: Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer; Aplikasi Teoritis dan Praktis Dakwah sebagai Solusi Problematika Kekinian*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm.116-117

untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang ada, agar apa yang menjadi cita-cita dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Melihat diskripsi dari fenomenologi yang tersebut di atas, tentunya kita menyadari bahwa peran strategi bagi aktifitas dakwah adalah sangatlah penting dalam menentukan sebuah langkah kebijakan suatu organisasi. Lebih lanjut, dalam konsep dasar strategi ini penulis akan membahas hal-hal sebagai berikut:

### **2.1.1. Pengertian Strategi Dakwah**

Memahami arti dari sebuah kata “strategi” memanglah tidak mudah, hal tersebut dikarenakan setiap literatur yang didapat antara satu dengan yang lain seringkali memberikan definisi yang berbeda, bahkan bisa dikatakan sampai saat ini tidak ada definisi yang baku mengenai istilah tersebut. Hal tersebut mengandung arti bahwa istilah strategi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas dan tidak terbatas, sesuai dengan setiap kata yang merangkainya seperti pada istilah strategi dakwah.

Perlu kita fahami bersama, bahwasanya istilah strategi dakwah merupakan kombinasi dari dua disiplin ilmu yang berbeda. Akan tetapi secara *konseptual-skematis*, dalam penelitian ini akan dijelaskan pengertian satu persatu, kemudian setelah ditemukan kejelasan masing-masing barulah akan ditarik suatu kesimpulan dan didefinisikan menjadi satu.

## 1. Strategi

Pada dasarnya istilah strategi yaitu berasal dari kata Yunani *Strategos* yang berarti Jenderal. Penggunaan istilah tersebut pertama kali yaitu dipopulerkan oleh kalangan militer. Dalam kamus induk disebutkan, strategi yaitu kiat atau cara-cara yang baik dan menguntungkan dalam setiap tindakan.<sup>38</sup> Penggunaan istilah strategi di kalangan militer biasanya lebih didominasi dalam situasi peperangan, sebagai tugas komandan dalam menghadapi musuh, yang bertanggung jawab mengatur cara atau taktik untuk memenangkan peperangan.

Dalam pengertian di atas, strategi juga dapat dipahami sebagai suatu seni para jenderal dalam menjalankan taktiknya di medan pertempuran. Dari sudut *etimologis* strategi dalam sebuah organisasi dapat diartikan yaitu sebagai suatu kiat, cara dan taktik yang dirancang secara sistematis dan terarah dalam melaksanakan fungsi-fungsi organisasi.<sup>39</sup> Strategi juga dipahami sebagai segala cara dan daya untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar memperoleh hasil yang diharapkan secara maksimal.

Kalau kita merujuk kepada ayat Al-Qur'an, sebenarnya di sana juga terdapat ayat-ayat yang mengindikasikan tentang strategi.

---

<sup>38</sup> M. Dahlan, Lya Sofwan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, (Surabaya: Target Press, 2003), hlm.740

<sup>39</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Strategik; Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang Pendidikan*, (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2005), hlm.147

Di antara ayat yang menerangkan hal tersebut yaitu seperti yang terdapat dalam Surat An-Nisa' ayat 71:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ اَنْفِرُوا جَمِيعًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama*”. (An-Nisa: 71)

Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Munir memaknai lafadz “*khudzuu khidzrokum*” dengan lafadz “*ikhtarizuu wa tayaqqodzu*”, maksudnya yaitu berhati-hati dan bangun untuk melawan musuh. Sedangkan dalam lafadz “*fan firuu*” diartikan dengan “*inhadzuu ila qitalihi*” yang bermakna bangkit memerangi musuh.<sup>40</sup> Strategi sesuai ayat di atas yaitu dapat bermakna kehati-hatian, sikap siaga dan waspada terhadap musuh, serta berusaha bangkit untuk menyerangnya. Dalam suatu organisasi, sebelum menentukan kebijakan-kebijakan pastilah dituntut untuk bersikap hati-hati dan waspada dalam menyusun suatu kebijakan. Hal tersebut dimaksudkan agar kinerja suatu organisasi dapat terkontrol dan terarah sesuai dengan haluan kebijakan yang telah ditetapkan.

Menurut M. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, ayat di atas mengandung makna yaitu kehati-hatian, serta menghadapi musuh dengan upaya mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, serta cara-cara yang paling tepat untuk menagkis dan

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsiiru Al-Muniiru; fi Al-Aqiidah, wa As-Syari'ah wa Al-Manhaj*, (Beirut: Darul Fikri, 1991), hlm.150

melumpuhkan mereka. Ayat Al-Qur'an di atas juga menjelaskan bagaimana kita dituntut untuk dapat mengelola dan mengatur pertempuran agar kita bisa meraih suatu kemenangan.<sup>41</sup>

Konsepsi tentang strategi ternyata dewasa ini tidak hanya dipergunakan oleh kalangan militer, akan tetapi oleh berbagai organisasi non militer. Dalam hal ini strategi yaitu bersinggungan dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian strategi dalam sebuah organisasi haruslah memanfaatkan kemampuan organisasi sedemikian rupa, dengan memperhitungkan kesempatan dan resiko yang timbul, sehingga pemanfaatan kemampuan organisasi tersebut mendatangkan efektifitas dan efisiensi yang akan dicapai dalam waktu tertentu. Ciri-ciri yang tercipta dengan pemanfaatan dana, daya dan tenaga yang sesuai dengan perubahan lingkunganlah yang dimaksud dengan strategi.<sup>42</sup>

Strategi seperti yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut: *Pertama*, Menurut Karl Van Calusewitz. Menurutnya strategi diartikan sebagai suatu seni bagi tentara dalam sebuah pertempuran. *Kedua*, Menurut Drucer. Strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*).<sup>43</sup> Dari kedua

---

<sup>41</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm.503

<sup>42</sup> Sondang P. Siagian, *Analisis serta Perumusan Kebijakan dan Struktur Organisasi*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), hlm.16-17

<sup>43</sup> Sri Wahyudi, *Manajemen Strategik; Pengantar Berfikir Strategik*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1996), hlm. 16

pengertian di atas, dapat dipahami bahwa strategi tidaklah sebatas dalam cakupan wilayah teori saja, akan tetapi strategi juga *include* dalam segi aplikasi dan implementasi.

Dari pemaparan di atas, dapat diambil beberapa pengertian tentang strategi yaitu: strategi dapat diartikan sebagai kerangka atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan (*goals*), kebijakan-kebijakan (*policies*) dan tindakan atau program organisasi. Strategi adalah suatu cara bagaimana suatu organisasi dapat mencapai suatu tujuan yang diinginkan pada masa yang akan datang. Strategi adalah pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>44</sup>

## 2. Dakwah

Dakwah bila kita tinjau dari perspektif etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab yaitu: دعا – يدعو – دعوة.<sup>45</sup> Kata tersebut secara leksikal memiliki arti seruan, panggilan dan ajakan. Adapun terminologi dakwah seperti diungkapkan oleh para ahli adalah sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Syekh Ali Mahfud dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin beliau mengungkapkan:

---

<sup>44</sup> Tripomo, MT, *Manajemen Strategi*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2005), hlm.17

<sup>45</sup> M. Munir, Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.17

<sup>46</sup> *Op.cit.* Aminuddin Sanwar, hlm.2-3

حَثُّ النَّاسِ عَلَى الْخَيْرِ وَالْهُدَى وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

لِيَفُوزُوا سَعَادَةَ الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ

Yang berarti dakwah adalah mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan mengikuti petunjuk (*Al-Huda*), menyuruh mereka berbuat baik dan melarang mereka dari perbuatan yang jelek agar mereka mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.

- b. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dakwah adalah mengajak seseorang agar beriman kepada Allah dan apa yang dibawa oleh para Rosul dengan membenarkan apa yang mereka beritakan, dan mengikuti apa yang mereka perintahkan.
- c. Prof. Dr. Abu Bakar Aceh beliau mengungkapkan : dakwah adalah perintah mengadakan seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasehat yang baik.
- d. Prof. H. M. Thoha Yahya Omar. Dakwah ialah mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
- e. Dr. Abdul Karim Zaidan. Dakwah adalah merupakan panggilan ke jalan Allah.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita fahami bahwasanya eksistensi dakwah pada intinya yaitu merupakan ajakan atau panggilan yang diarahkan pada masyarakat luas untuk menerima kebaikan dan meninggalkan keburukan sesuai dengan koridor *syara'*. Selain itu dakwah juga merupakan suatu usaha untuk menciptakan situasi yang lebih baik sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dalam setiap lini kehidupan.

Dari penjelasan di atas, strategi dakwah dapat diartikan sebagai suatu proses dalam mengatur, mengarahkan, dan menentukan cara daya dan upaya untuk menghadapi sasaran dakwah dalam situasi dan kondisi tertentu agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran dakwah dapat tercapai secara maksimal. Dengan kata lain strategi dakwah merupakan siasat, taktik atau cara yang dirancang secara sistematis dan terarah yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Hal demikian tentunya mengindikasikan bahwasanya keberadaan daripada apa yang dinamakan sebagai “strategi dakwah” adalah mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu organisasi dakwah.

### **2.1.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Strategi Dakwah**

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarnya akan cenderung ditentukan oleh dinamika organisasi yang bersangkutan. Dinamika yang tercipta dalam sebuah organisasi tersebut sejatinya disebabkan oleh adanya interaksi yang terjadi baik

antara organisasi dengan lingkungannya, maupun satuan-satuan kerja dalam organisasi tersebut. Pada gilirannya interaksi yang terjadi merupakan suatu akibat dan bukan merupakan tuntutan dari *interdependensi* yang terdapat antara organisasi dengan lingkungannya dan antara berbagai sub sistem dalam organisasi.

Dinamika yang mutlak terjadi dalam organisasi dakwah, mendorongnya untuk meningkatkan kemampuan dalam perumusan strategi yang diterapkan. Pada titik tertentu dinamika itulah yang akan mempengaruhi dalam proses penyusunan strategi dakwah. Hal ini penting diketahui dan dipahami oleh suatu organisasi, dikarenakan dinamika perkembangan zaman yang terus berubah pada setiap lini kehidupan telah mendorong perubahan pula dalam penetapan strategi.

Bila kita cermati terdapat beberapa faktor yang turut berpengaruh dalam penyusunan strategi dakwah. Diantara faktor-faktor yang turut andil dalam mempengaruhi penentuan strategi adalah faktor lingkungan, baik itu yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri (*internal factor*) ataupun faktor lain yang berasal dari lingkungan luar organisasi (*eksternal factor*).

Dalam bukunya Prof. Sondang, P Siagian mensinyalir setidaknya terdapat empat faktor dalam menentukan strategi yaitu:<sup>47</sup>

1. Faktor ekonomi

---

<sup>47</sup> *Op. Cit.* Sondang P. Siagian, hlm.107-108

Tidak hanya dalam organisasi profit, organisasi non-profit pun termasuk didalamnya organisasi dakwah, didalam menentukan dan menerapkan strateginya pastilah bergantung pada SDM (sumber daya manusia) dan SDA (sumber daya alam) yang ia miliki. Hal tersebut dikarenakan program-program yang telah tersusun dalam suatu organisasi pastilah tidak akan bisa berjalan tanpa adanya SDM dan SDA yang mendukungnya.

Dalam hal ini ekonomi menjadi faktor utama yang berpengaruh dalam penerapan strategi suatu organisasi. Hal tersebut dikarenakan suatu organisasi dalam menentukan langkahnya pastilah akan berorientasi pada sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya yang bersifat material atau immaterial. Meskipun target yang akan dicapai tinggi akan tetapi tanpa ada dukungan dari sisi materi maka dapat dipastikan target tersebut akan sulit terealisasi.

## 2. Faktor politik

Politik yang sedang hangat terjadi baik dalam lingkungan internal organisasi ataupun di luar organisasi turut pula berpengaruh pada strategi yang diterapkan dalam suatu organisasi. Politik yang mempengaruhi penetapan strategi dalam suatu organisasi ketika tidak disikapi dengan kemaslahatan bersama dalam pencapaian tujuan organisasi dapat membawa dampak buruk terhadap organisasi yang bersangkutan.

Organisasi bisa jadi hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab demi mencapai tujuan pribadinya. Sebagai suatu contoh “*gap*” yang terjadi antara personal anggota dalam suatu organisasi dikarenakan perbedaan politik, maka sudah pasti strategi yang telah dicanangkan kurang bisa terlaksana seperti apa yang menjadi tujuan organisasi tersebut.

### 3. Faktor dari implikasi kebijakan pemerintah

Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berlaku dalam suatu negara tentunya berimbas pula pada semua lini kehidupan tak terkecuali dalam organisasi dakwah. Hal demikian dikarenakan peraturan yang ditetapkan oleh suatu pemerintah wajib dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, dan hal inilah yang turut pula mewarnai dalam strategi dakwah yang diterapkan dalam suatu organisasi.

### 4. Faktor teknologi

Teknologi sebagai suatu sarana yang dimiliki oleh sebuah organisasi, tentunya akan mendukung penetapan strategi yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi yang masih menggunakan data manual. Begitupula berlaku dalam suatu organisasi yang masih menggunakan peralatan yang seadanya, tentunya target dari strategi yang dihasilkan akan bergantung dari sarana dan prasarana yang mendukungnya. Organisasi dakwah yang telah memiliki

seperangkat teknologi yang telah maju, memungkinkan menerapkan strategi dakwah dengan teknologi yang telah ada.

Dari faktor-faktor yang tersebut di atas, tentunya kita mengetahui bahwa strategi dakwah yang diterapkan dalam suatu organisasi dakwah adalah sangat dipengaruhi dari faktor lingkungannya, baik itu lingkungan dalam ataupun lingkungan luar organisasi.

### **2.1.3. Teknik-teknik dan Proses dalam Penyusunan Strategi Dakwah**

Dalam prakteknya agar strategi yang diterapkan oleh sebuah organisasi dapat berhasil maksimal dan tidak terjadi ketimpangan kebijakan, maka antara rencana strategis (renstra) dan rencana operasional (renop) haruslah berjalan sejajar guna mewujudkan visi dan misi dari strategi yang ditargetkan tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya dibutuhkan teknik-teknik dalam penetapan strategi yang dimaksud. Dalam bukunya, Prof. Hadari Nawawi menyebutkan teknik-teknik yang bisa digunakan antara lain:<sup>48</sup>

1. Teknik Matrik Faktor Internal dan Eksternal (*The Internal and Eksternal Factor Matrix*), yaitu penyusunan strategi dengan cara menganalisa dan mengevaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta mengkaji peluang dan hambatan yang dihadapi

---

<sup>48</sup> *Op. Cit.* Hadari Nawawi. Hlm.174-177

dalam melaksanakan suatu misi, baik yang bersumber dari dalam atau luar organisasi.

2. Teknik Matrik Memperkuat dan Mengevaluasi Posisi (*The Strength Position and Evaluation Matrix*), yaitu penyusunan strategi dengan cara mencocokkan sumber daya internal yang dimiliki (kinerja organisasi) untuk memperkuat posisi dengan peluang yang ada, dan mengatasi atau menghindari resiko eksternal.
3. Teknik Matrik dari Kelompok Konsultasi Boston (*The Boston Consulting Group matrik*), yaitu penyusunan strategi dengan cara menetapkan strategi yang berbeda-beda untuk setiap biro atau departemen sebagai satu unit kesatuan.

Dalam penyusunan suatu strategi dakwah, selain memerlukan suatu teknik penyusunan strategi seperti yang tersebut diatas, disini lain juga harus mempertimbangkan tahapan-tahapan penyusunannya. Tahapan-tahapan dalam penyusunan strategi dakwah dimaksudkan agar lebih mudah dalam melakukan manajemen atas strategi dakwah yang akan diterapkan.

Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan strategi seperti yang dikemukakan oleh Triton PB dapat dikelompokkan kedalam enam tahapan penyusunan strategi. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seleksi yang mendasar dan kritis terhadap permasalahan

2. Menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategi
3. Menyusun perencanaan tindakan (*action plan*)
4. Menyusun rencana penyumberdayaan
5. Mempertimbangkan keunggulan
6. Mempertimbangkan keberlanjutan<sup>49</sup>

Selanjutnya keenam langkah tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: *Pertama*, seleksi mendasar dan kritis terhadap permasalahan. Seleksi tersebut biasanya dilakukan berdasarkan faktor internal ataupun eksternal yang menjadi penyebab permasalahan dalam suatu organisasi dakwah. Adapun seleksi tersebut dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi seluruh permasalahan
- b. Mengidentifikasi dan mengelompokkan masing-masing permasalahan berdasarkan faktor internal dan eksternalnya
- c. Mengurutkan permasalahan berdasarkan tingkat kepentingannya
- d. Menentukan skala prioritas penyelesaian masalah

*Kedua*, menetapkan tujuan dasar dan sasaran strategi. Tujuan dasar dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi hendaknya tidak bertentangan dengan arah, cakupan, dan perspektif jangka panjang suatu organisasi, dikarenakan tujuan dan sasaran merupakan acuan yang menjadi dasar pengukiran berhasilnya strategi yang diterapkan. *Ketiga*, yaitu *action plan*. Dalam penyusunan

---

<sup>49</sup> Triton PB, *Marketing Strategic; Meningkatkan Pangsa Pasar dan Daya Saing*, (Yogyakarta: Tugu Publisier, 2008), hlm.17

strategi, biasanya terdapat dua tipe yang harus diperhatikan yaitu: rencana konsepsional (teoritis) dan dan rencana tindakan. Suatu rencana mungkin baik secara koseptual akan tetapi belum tentu sesuai atau baik dilapangan. Hal inilah yang kemudian sebuah strategi akan ditentukan oleh penyusunan rencana tindakan. Oleh karena itu dalam penyusunan suatu strategi setidaknya harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Meninjau kembali langkah-langkah dalam strategi yang akan mungkin diterapkan
- 2). Mengidentifikasi dan menginventarisasi faktor-faktor operasional, baik yang bersumber dari lingkungan internal ataupun eksternal

Selain itu John M. Bryson juga mengemukakan bahwa untuk mencapai strategi yang tepat, maka suatu organisasi dituntut untuk memperhatikan langkah-langkah yang tepat pula didalam menyusunnya. Adapun langkah-langkah tersebut seperti yang diungkapkannya adalah sebagai berikut:<sup>50</sup>

*Pertama*, yaitu memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menegosiasikan suatu kesepakatan dengan orang-orang penting pembuat keputusan (*decision maker*), atau pembentuk opini (*opini leaders*) internal dan tidak mungkin menutup kemungkinan dari

---

<sup>50</sup> M. Mftahuddin. *Perencanaan Strategis Sebagai Organisasi Sosial. Terjemah* :Jhon M Bryson, *Strategik Planning For Public And Nonprofit Organizations; A Guide Strengthening An Sustaining Organizational Achievent*. Cet. IV. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.55-57

kalangan eksternal tentang seluruh upaya perencanaan strategi dan langkah perencanaan yang penting yang akan diterapkan. Dengan kata lain, dalam suatu organisasi harus terdapat beberapa orang atau kelompok yang memulai suatu proses didalam penetapan suatu strategi, yang mana dalam suatu organisasi harus terdapat salah satu pemrakarsa yang menetapkan secara tepat siapa saja yang tergolong orang-orang penting pembuat keputusan. Ketika hal ini sudah bisa dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan orang, kelompok, atau suatu unit organisasi yang harus dilibatkan dalam upaya perencanaan suatu strategi. Kesepakatan awal yang dihasilkan kemudian akan dinegosiasikan dengan setidak-tidaknya beberapa dari pembuat keputusan dalam organisasi tersebut.

*Kedua*, yaitu memperjelas mandat organisasi. Tidak dapat dipungkiri, bahwa mandat yang terdapat dalam suatu organisasi memiliki kedudukan yang sangat krusial didalam dinamika roda suatu organisasi. Mandat yang bersifat formal ataupun informal yang ditempatkan pada suatu organisasi adalah merupakan suatu “keharusan” yang dihadapi oleh suatu organisasi yang bersangkutan. Dengan memperjelas mandate suatu organisasi, maka suatu organisasi dalam oprasionalnya dapat megetahui fungsi dan tugas, serta tujuan organisasi tersebut.

*Ketiga*, yaitu mempertegas dan memperjelas misi dan nilai-nilai yang diusung oleh suatu organisasi. Misi suatu organisasi yang

dimaksud disini adalah misi yang berkaitan erat dengan mandatnya. Melihat sudut pandang tersebut, maka kehadiran suatu organisasi dapat dipahami sebagai suatu alat menuju akhir pencapaian tujuan, akan tetapi bukan akhir dari tujuan itu sendiri. Memperjelas misi haruslah disusun lebih dari sekedar memperjelas keberadaan organisasi.

*Keempat*, yaitu menilai lingkungan eksternal. Disini tim perencanaan harus mengeksplorasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh suatu organisasi.

*Kelima*, yaitu menilai lingkungan internal. Untuk mengenali kekuatan dan kelemahan internal, organisasi dapat memantau sumber daya (*input*), strategi sekarang (*proses*) dan kinerja (*output*). Karena sebagian besar organisasi biasanya mempunyai banyak informasi tentang *input* organisasi, seperti gaji, pasokan, bangunan fisik dan personalia yang sama dengan personalia penuh waktu (*full-time equivalent*).

*Keenam*, yaitu mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi. Identifikasi terhadap isu-isu strategis akan dapat berjalan maksimal apabila kelima langkah sebelumnya sudah bisa dilakukan dengan baik. Perencanaan strategis memfokuskan kepada tercapainya sasaran yang terbaik antara organisasi dan lingkungannya. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dan lingkungan eksternalnya

dapat dipikirkan sebagai perencanaan dari luar ke dalam (*the outside in*). Perhatian kepada misi dan nilai-nilai maupun lingkungan internal dapat dianggap sebagai perencanaan dari dalam ke luar (*the inside out*).

*Ketujuh*, yaitu merumuskan strategi untuk mengolah informasi dari isu-isu yang telah didapat. Strategi diidentifikasi sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang menegaskan bagaimana organisasi harus mengerjakan hal itu. Strategi yang diterapkan organisasi satu dengan lainnya dapat berbeda-beda dikarenakan tingkat, fungsi dan kerangka waktu yang diterapkan.

*Kedelapan*, yaitu merumuskan suatu visi organisasi yang efektif untuk waktu yang akan datang. Langkah terakhir dalam proses perencanaan, organisasi mengembangkan deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu bertindak. Sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

Dari praktiknya kedelapan langkah perencanaan strategis tersebut di atas juga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. *Strength* (kekuatan)

Yaitu strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi dengan memanfaatkan keseluruhan kekuatan untuk memaksimalkan dan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki organisasi.

b. *Weakness* (kelemahan)

Yakni strategi yang diterapkan dalam suatu organisasi haruslah berdasar pada kegiatan yang bersifat *defensif* dan berusaha meminimalisir kelemahan yang ada serta menghindari ancaman yang diprediksikan bisa timbul.

c. *Opportunity* (peluang)

Yakni strategi yang diterapkan haruslah berdasarkan pada pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalisir kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

d. *Threats* (ancaman)

Yakni strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi untuk mengatasi ancaman. Dengan melihat keempat hal di atas, maka dapat diambil kesimpulan, dengan memperhatikan SWOT tersebut, maka sebuah organisasi akan dapat menjalankan program-program yang telah disusun dan memperoleh hasil yang dikehendaki oleh organisasi.

## 2.2. Konsep Dasar Deradikalisasi Agama

Tidak dapat dipungkiri sebagai seorang muslim, kita dituntut untuk senantiasa menyiarkan dan menyebarkan *syari'at* Allah di muka bumi ini. Dalam agama Islam hal tersebut yang kemudian kita kenal dengan istilah *amar ma'ruf nahi munkar* (perintah untuk melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan).

*Amar ma'ruf nahi munkar* yang merupakan penjelmaan dan pengejawantahan dari intisari dakwah, adalah suatu kewajiban bagi semua orang Islam.<sup>51</sup> Hal tersebut sesuai dalam Al-Qur'an surat Ali 'Imron ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.* (QS. Ali Imron: 104)

Ketika dakwah telah menggejala dan menuntut aplikasinya, maka setiap elemen masyarakat ataupun organisasi masyarakat (ormas) yang mempunyai misi dakwah, maka mereka mencoba meng-interpretasikan ayat tersebut sesuai dengan apa yang mereka pelajari dan ketahui sesuai dengan aliran dan faham yang mereka anut. Di sinilah awal mula permasalahan yang dimungkinkan dapat menyulut aksi radikal yang berkedok “agama”.

Penjelmaan ormas-ormas yang menampakkan dirinya dengan kajian baik itu Al-Qur'an dan Al-Hadits secara apa adanya (*tekstualis*) seperti kelompok yang tergabung dalam Ikhwanul Muslimin Indonesia (IMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Negara Islam Indonesia (NII) pada realitanya

---

<sup>51</sup> Menurut Aminuddin Sanwar, kadar kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar haruslah disesuaikan dengan porsi kekuatan (jabatan/kewenangan) masing-masing individu orang. Hal tersebut mengacu pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: *من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فليسانه فان لم يستطع فليقلبه وذلك اضعف الايمان*. Dan hal demikian yang nampaknya kurang diperhatikan oleh kaum radikal, sehingga mereka dalam berdakwah hanya dari segi subjektifitas kebenaran yang mereka yakini. Kewajiban dan dan hadits diatas dapat diakses di: Aminuddin Sanwar, *Pengantar Ilmu Dakwah*, (Semarang: Fakultas Dakwah, 1986), hlm.5

kelompok inilah yang sering melakukan aksi radikal yang ada, dan harus diantisipasi dan ditangani keberadaanya agar tidak menimbulkan aksi yang meresahkan. Menurut Dr. Amirsyah, sebenarnya yang menjadi acuan dari konsepsi dasar dilakukanya suatu tindak penanganan terhadap kejadian radikalisasi agama yang ada selama ini yaitu kurang lebih didasarkan pada paradigma berikut:<sup>52</sup>

1) Pancasila sebagai landasan Idiil

Pancasila sebagai dasar Negara dan falsafah bangsa tentunya mengikat dan mempunyai kekuatan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang ada. Dalam hal ini NU yang turut selalu mendukung dan memperjuangkan penerapan pancasila sebagai asas Negara, bukan piagam Jakarta adalah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penanganan deradikalisasi, baik ditingkat pusat sampai wilayah ataupun kota seperti Semarang.

2) UUD NRI 1945

Dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tersebut, khususnya pada pasal 28 E ayat 1 disebutkan, bahwa :

*“setiap orang berhak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya memilih pendidikan da pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal diwilayah Negara dan meninggalkanya serta berhak kembali”.*

---

<sup>52</sup> Dr. Amirsyah, *Meluruskan Salah Faham Terhadap Deradikalisasi; Pemikiran, Konsep, dan Strategi Pelaksanaan*, (Jakarta: Grafindo Hazanah Ilmu, 2012), hlm.25-27

Pasal tersebut adalah mengindikasikan kebebasan beribadah dan memeluk agama, guna dijadikan landasan dari penanganan dan penyelesaian deradikalisasi agama yang ada.

Sejatinya konsepsi tentang deradikalisasi agama tidak akan muncul melainkan berangkat dari radikalisme agama. Radikalisme agama dalam prakteknya sering menghalalkan suatu cara untuk mencapai suatu tujuan, baik itu menggunakan teror fisik atau teror mental seperti *sweeping* dan penutupan hiburan malam ketika bulan Ramadhan. Akan tetapi penanganan tindak radikal yang bernuansa agama dengan menggunakan "*hard power approach*" (pendekatan kekuatan) oleh pihak aparat seperti yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror, adalah bukan merupakan jawaban yang tepat untuk menyelesaikan akar persoalan radikalisme agama yang ada. Hal tersebut terbukti lebih dari 50 tahun Indonesia yang tak kunjung selesai menangani kasus DI/Nil. Setelah penanganan kasus radikalisme yang bernuansa agama menggunakan pendekatan "*Hard Measure*" dirasa tidak berhasil, maka pemerintah Indonesia secara *sistemik* yaitu mencanangkan program penanganan menggunakan pendekatan "*soft approach*" yang dioperasikan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang sekarang ini lebih dikenal dengan istilah "*Deradikalisasi*".

### **2.2.1. Pengertian dan Ciri-ciri Radikalisme Agama**

Secara etimologi radikalisme merupakan serapan dari bahasa latin yaitu "*radix*" yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris *radical*

dapat berarti ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner dan fundamental.

Pada awalnya istilah radikalisme agama justru diintrodusir dari tradisi Barat, terutama yaitu dikalangan keagamaan Kristen Protestan AS sekitar tahun 1910an. Dalam perkembangannya, seperti disampaikan oleh Roger Garaudy yang merupakan filosof dari Perancis menyatakan, bahwa radikalisme tidak hanya berkisar pada faham keagamaan, akan tetapi istilah tersebut telah menjelma dalam kehidupan sosial, politik dan budaya. Dengan demikian berarti, setiap ideologi atau pemikiran yang mempunyai dampak negatif (*side effect*) yang dapat membawa seseorang menjadi militan dan fanatik maka hal tersebut dapat dikategorikan kedalam radikalisme.<sup>53</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa berbagai ideologi yang ada seperti liberalisme, marxisme, leninisme, dan lain sebagainya adalah dapat dipahami sebagai fundamentalisme atau radikalisme. Dengan demikian, cakupan dari istilah radikalisme ini tergantung dari mana kita melihat dan mengkajinya, yang dalam penelitian ini yaitu penulis mengetengahkan dan membatasi radikalisme dalam lingkup agama yang dalam hal ini yang dimaksud adalah agama Islam.

Pada hakekatnya faham radikalisme terhadap suatu agama adalah tidak merupakan suatu masalah yang menjadi momok dan

---

<sup>53</sup> A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Jatim: PWNU Jawa Timur, 2010), hlm.30-32

menakutkan, selama masih dalam koridor pemikiran (ideologis) para pengikutnya. Akan tetapi ketika ideologi tersebut telah bergeser dan menjelma menjadi gerakan-gerakan yang menimbulkan keresahan, kekerasan dan masalah lain yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat dan memporak-porandakan tatanan yang sudah ada, maka di sinilah radikalisasi agama yang timbul perlu mendapatkan perhatian bersama. Hal tersebut dikarenakan, fenomena-fenomena sebagaimana disebutkan akan dapat menyebabkan suatu konflik, dikarenakan perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap nilai-nilai agama. Bahkan pada level yang lebih tinggi dapat memunculkan kekerasan antara dua kelompok yang berbeda pemahaman tersebut.

Bila kita analisa, diantara penyebab yang menyulut aksi radikalisme yang bernuansa agama adalah mulai persoalan domestik sampai persoalan internasional, yang memojokkan kelompok tertentu. Dalam wilayah agama, konsepsi ajaran yang berbeda dengan kenyataan, seperti semakin menjamurnya tempat-tempat hiburan yang digunakan sebagai ajang maksiat, Kiai sebagai pemuka agama yang mestinya dihormati akan tetapi malah sebaliknya, seperti pembantaian kiai seperti terjadi di Poso (25 Desember 1998).

Dalam kasus di atas, aparat pemerintah sebagai pengayom seluruh elemen warganya juga malah terkesan lalai dan tidak konsisten di dalam menerapkan perundang-undangan yang telah disepakati bersama. Hadirnya organisasi keagamaan seperti NU,

Muhammadiyah dan MUI yang tidak dapat merealisasikan nilai-nilai "ideal" dan memecahkan masalah agama juga bisa menjadi penyebab munculnya radikalisme agama yang ada. Di sisi lain tuntutan untuk menjalankan nilai-nilai agama harus mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam lingkup internasional realitas politik standar ganda yang diterapkan oleh Amerika dan sekutunya juga turut memicu berkembangnya radikalisme agama saat ini.<sup>54</sup>

Penyebutan radikal terhadap kelompok yang memiliki karakter dan pola umum sebagai sebuah gerakan yang menginginkan ditegakkannya syari'at Islam secara terminologi sebagaimana disebutkan oleh Kallen setidaknya memiliki tiga karakteristik yaitu:<sup>55</sup> *Pertama*, radikalisme muncul sebagai respon yang berupa evaluasi, penolakan atau perlawanan terhadap kondisi yang sedang berlangsung, baik itu berupa asumsi nilai sampai dengan lembaga agama atau negara. *Kedua*, radikalisme selalu berupaya mengganti tatanan yang sudah ada dengan sebuah tatanan baru yang disistematisir dan dikonstruksi melalui *world view* (pandangan dunia) mereka sendiri. *Ketiga*, kuatnya keyakinan akan ideologi yang mereka tawarkan. Hal tersebut rentan memunculkan sikap emosional yang potensial melahirkan kekerasan.

---

<sup>54</sup> *Op.cit*, Endang Turmudi, Riza Sihbudi (ed), hlm.1-6

<sup>55</sup> Umi Sumbulah, *Islam Radikal dan Pluralisme Agama: Studi Konstruksi Sosial Aktivis Hizb al-Tahrir dan Majelis Mujahidin di Malang tentang Agama Kristen dan Yahudi*, (Jakarta: BALITBANG RI, 2010), hlm.42

Berdasarkan karakteristik sebagaimana disebutkan Kallen diatas, Islam radikal dapat didefinisikan yaitu sebagai suatu kelompok yang berupaya menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebaga *basic values* (nilai dasar) dari segala aspek kehidupan.

Melihat epistemologi radikalisme seperti yang terdiskripsi diatas, Rubaidi yang mengadopsi istilah Martin E. Marty mensinyalir radikalisme agama memiliki ciri-ciri sebagai berikut.<sup>56</sup>

*Pertama*, fundamentalisme, menurutnya hal ini dipahami sebagai gerakan perlawanan yang banyak kasus biasanya dilakukan secara radikal, yang demikian merupakan respon dari ancaman yang bisa membahayakan eksistensi dari suatu agama. Bentuk ancaman yang mereka sinyalir bisa mengganggu eksistensi agama mereka adalah seperti modernisasi, sekularisasi, serta tatanan nilai barat lainnya. Adapun acuan yang digunakan mereka adalah bersumber dari kitab suci mereka.

Dengan demikian, gerakan perlawanan yang dilakukan para aktifis gerakan Islam fundamentalis sejatinya merupakan tindakan subjektif-individual, yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kolektif yang berkembang dalam sebuah gerakan. Tindakan subjektif yang dimaksud dapat berupa tindakan nyata yang diarahkan kepada pihak tertentu atau agama lain maupun tindakan yang bersifat membatin dan

---

<sup>56</sup> *Op.cit*, A. Rubaidi, hlm.35-37

sangat subjektif, baik berupa pengetahuan, pemahaman, maupun persepsinya.<sup>57</sup>

*Kedua*, penolakan terhadap *hermeneutika*. Hal ini dapat dimaknai bahwa kaum radikal menolak terhadap sikap kritis teks agama dan segala bentuk interpretasinya. Teks-teks Al-Qur'an hanya dimaknai apa adanya. Kitab suci dimaknai benar adanya tanpa mempertimbangkan rasionalitas (nalar) dan *sabab nuzul* ayat, sehingga dalam implementasinya mereka harus mengamalkan Al-Qur'an secara literal, sesuai dengan apa yang tertera tanpa pertimbangan akal.

*Ketiga*, penolakan terhadap pluralisme dan relativisme. Bagi kaum radikal pluralisme merupakan pemahaman yang keliru terhadap teks-teks kitab suci. *Intervensi* nalar terhadap al-qur'an dan perkembangan sosial kemasyarakatan yang telah lepas dari kendali agama, serta pandangan yang tidak sejalan dengan kaum radikal adalah potret dari bentuk *relativisme* keagamaan yang ada.

*Keempat*, penolakan terhadap perkembangan *historis* dan *sosiologis*. Perkembangan ini dinilai oleh kaum radikal sebagai muara ketidak sesuaian dalam keberagaman, mereka menilai bukan Al-Qur'an yang harus mengikuti nalar, akan tetapi akal lah yang seharusnya tunduk dan patuh terhadap semua nilai-nilai Al-Qur'an dalam menginterpretasi nilai-nilai agama.

---

<sup>57</sup> Umi Sumbulah, *Konfigurasi Fundamentalisme Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm.22

### 2.2.2. Sejarah dan Pemicu Munculnya Radikalisme Agama

Maraknya gerakan Islam radikal, yang oleh Rubaidi disebut dengan gerakan fundamentalisme Islam, di Indonesia sejatinya telah mengalami perkembangannya sejak tahun 1980-an. Hal tersebut ditandai dengan munculnya fenomena menguatnya religiusitas umat Islam. Ekspresi gerakan ini semakin terbuka, tidak seperti gerakan sempalan, yang oleh Bruinessen didefinisikan sebagai gerakan yang menyimpang atau memisahkan diri dari “*ortodoksi*” (penerapan ajaran murni) yang berlaku. Untuk memahami gejala radikalisme agama yang ada, menurut Umi Sumbulah setidaknya terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu dari segi objektivitas dan subjektivitas.

Dari segi objektivitas, dapat kita pahami bahwa pemicu munculnya radikalisme agama adalah karena teks-teks agama memberikan legitimasi dan menganjurkan hal demikian. Dalam konteks ini jelas kita tahu bahwa dalam pandangan Islam agama-agama selain daripada Islam seperti Kristen dan Yahudi adalah musuh. Asumsi demikian tentunya telah membuka cakrawala bagi para pengikutnya, bahwa dalam upaya berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai agama, seolah-olah mereka diperkenankan menggunakan jalan kekerasan ataupun jalan lain seperti permusuhan. Padahal hal demikian adalah salah kaprah, hal tersebut dapat dicontohkan oleh Rosul dalam membagi golongan *non*-Islam kedalam dua bagian yaitu golongan “*harbi*” yaitu golongan yang wajib diperangi, dikarenakan

mereka melawan terhadap daulah islamiyah. Sedangkan disisi lain ada golongan yang dinamakan dengan kafir “*dzimmi*” yaitu golongan yang wajib dilindungi dikarenakan mereka taat dan mau membayar *jizyah* (pajak).

Dari segi subjektivitas, setiap individu sebagai subjek yang aktif telah mendefinisikan hidupnya dengan dunia luar, dan mengimplementasikan ajaran yang ia dapat dalam kehidupannya. Hal tersebut telah memberikan makna bahwa gejala radikalisme tidak hanya dipahami dari teks agama saja, akan tetapi juga harus dicermati dari dunia luar yang telah menjadi *entitas* yang turut mempengaruhi seseorang dalam menginternalisasikan agamanya.<sup>58</sup>

Dengan demikian, timbulnya radikalisme agama ternyata tidak hanya murni dari interpretasi ajaran agama saja, akan tetapi radikalisme agama juga bisa disebabkan oleh struktur sosial, ekonomi politik yang ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa sikap *fanatik*, *intoleran* dan *eksklusif* ditengarai sebagai pemicu munculnya radikalisme agama. Ketika kita lacak akar pemicu munculnya faham radikal terhadap ajaran agama secara lebih umum dalam agama Islam, sikap-sikap tersebut sejatinya telah ditampakkan pertama kali oleh kaum *Khawarij*. Pada mulanya kelompok ini adalah merupakan pengikut

---

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm.43

dari *Khalifah* Ali bin Abi Thalib atau yang kita kenal dengan kelompok Syi'ah.

Fenomena munculnya kaum Khawarij adalah berawal dari terjadinya perang *Siffin*, yaitu peperangan yang terjadi antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah yang terjadi pada tahun ke-37 Hijriyah atau 648 Masehi. Ketika perang sedang berlangsung dan kelompok Ali hampir memenangkan peperangan, kemudian Muawiyah yang dikenal dengan orang yang cerdas menawarkan perundingan damai atau yang dikenal dengan istilah "*Tahkim*" sebagai jalan penyelesaian permusuhan.

Ali yang dikenal dengan sosok yang arif kemudian menerima tawaran "*tahkim*" yang diajukan oleh Muawiyah. Akan tetapi di sisi lain, ternyata kesediaan Ali untuk menerima "*tahkim*" kepada pihak Muawiyah telah mengakibatkan 4000 pasukan pengikutnya memisahkan diri dan membentuk kelompok baru yang kemudian dikenal dengan nama Khawarij. Mereka menolak perundingan dan menginginkan permusuhan yang terjadi diantara mereka haruslah diselesaikan dengan kehendak Tuhan, bukan lewat perundingan.

Kaum *Khawarij* menganggap bahwa penyelesaian peperangan menggunakan perundingan adalah telah melawan kehendak Tuhan. Atas dasar inilah kemudian kaum Khawarij mengkafirkan (*takfir*) terhadap kelompok Ali dan Muawiyah. Selain itu mereka juga

menganggap kafir terhadap mayoritas kaum muslimin yang moderat dan menuduhnya sebagai pengecut.

Bagi kaum Khawarij, orang-orang yang ia anggap kafir sekalipun adalah orang Islam dianggapnya sebagai orang-orang yang halal darahnya, mereka boleh dibunuh dan dimusnahkan dari muka bumi ini. Atas dasar itulah kaum Khawarij kemudian melakukan propaganda, kekerasan dan berbagai motif teror terhadap orang Islam yang tidak sependapat dengan mereka. Selain itu mereka juga memasukkan jihad sebagai rukun iman,<sup>59</sup> Ali pun dibunuh oleh seorang *Khawarij* yang bernama Ibnu Muljam sewaktu beliau lagi solat subuh.

Pada akhirnya pola pemikiran dan sikap keagamaan model *Khawarij* inilah yang kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh paham Wahabi di Arab Saudi yaitu mulai abad ke-12H atau ke-18M yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Lebih spesifik lagi radikalisme agama yang terjadi di Indonesia menurut Van Bruinesen yang ia sebut sebagai “Islam radikal” dapat dilacak pada munculnya *Darul Islam* (DI) dan partai berbagai macam partai politik seperti Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) yang ada di berbagai kota di Indonesia.

*Darul Islam* (DI) membangun *fragmen* kelompoknya dengan kekuatan militer. Beberapa pemberontakan pun terjadi diberbagai

---

<sup>59</sup> Rahimi Sabirin, *Islam dan Radikalisme*, (Jakarta: Athoyiba, 2004), hal.6-8

wilayah ditanah air, seperti di Sulawesi Selatan (Kahar Mudzakar), Kalimantan Selatan (Ibnu Hajar), Aceh (Daud Beureuh), dan di Jawa Barat (Kartosuwiryo). Dengan kekuatan ini, DI melancarkan pemberontakan kepada pemerintah Republik Indonesia secara terbuka, kendatipun kemudian dapat diberangus oleh rezim politik waktu itu. Sedangkan Masyumi membawa gagasan Islam dalam kerangka kenegaraan di parlemen dan sejarah pencatatnya berhasil menduduki peringkat kedua pada pemilu tahun 1955.

Di Indonesia awal mula munculnya Islam sebagai kekuatan politik adalah merupakan *transformasi* dari kekuatan ekonomi umat yang ditujukan untuk melawan hegemoni ekonomi China dan kolonial dipasar lokal. Konteks kemunculan Sarekat Islam (SI) bermula dari H. Samanhudi, yang mempersatukan kepentingan ekonomi umat Islam ke dalam satu wadah, yang akhirnya bertransformasi menjadi satu partai politik. Awal kemunculan Sarekat Islam bermula dari inisiatif dari pedagang-pedagang muslim untuk melindungi kepentingan dagang mereka dari ekspansi China. Pada perkembangan berikutnya SI pasca Tcokroaminoto terfragmentasi menjadi SI-Merah yang kemudian menjelma menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI).<sup>60</sup>

Dari berbagai fenomena yang melatar belakangi munculnya radikalisme agama di Indonesia, dapat diketahui bahwasanya sejarah umat Islam di Indonesia terjadi akibat pergolakan kepentingan-

---

<sup>60</sup> Ahmad Rizky, dalam: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 14*, (Yogyakarta: FISIP UGM, 2010), hlm.173

kepentingan mereka yang “termarjinalkan”. Hal tersebut dapat terlihat pada rezim Orde Baru yang mengambil alih peran sebagai pemilik sumber daya dan secara *represif* telah melakukan subordinasi kepada kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi oposisi terhadap sentralisme peranan negara.

Kemunculan gerakan-gerakan Islam yang dinilai “radikal” pada era Orde Baru, melalui perangkat-perangkat birokrasinya mulai dari aparat sipil sampai militer telah mentransformasikan diri menjadi rezim *otoritarian* dengan cara menindas kekuatan-kekuatan yang berpotensi menjadi oposisi. Seperti ideologi komunisme dijadikan sebagai ideologi terlarang, sedangkan nasionalisme yang merupakan ideologi terkuat pasca tahun 1955, dipersempit ruang geraknya dengan cara membungkam hak politik tokoh-tokohnya.

Kemudian untuk melakukan subordinasi terhadap kekuatan Islam inilah maka lahir diskursus dengan apa yang dinamakan dengan “Islam Radikal”. Pada rezim Orde Baru kasus yang pertama kali mencuat yaitu Komando Jihad yaitu tepatnya pada pembajakan pesawat Woyla, dan inilah yang disinyalir sebagai aksi terorisme pertama kali yang ada di Indonesia.<sup>61</sup>

Jika kita lihat dengan kaca mata ekonomi dan politik, seting Orde Baru yang berkarakter sangat kuat, dengan ideologi *developmentalisnya* telah mengakibatkan kelompok kelas pekerja

---

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm.175

yang miskin merasa termarginalkan oleh rezim tersebut dan kemudian muncul ke permukaan untuk melakukan perlawanan. Situasi marginal seperti ini telah mengakibatkan mereka menjadi radikal dengan keyakinan agama Islam yang dianutnya. Akan tetapi jumlah ini tidak seberapa dibanding dengan kelompok kelas menengah yang terlempar dari lingkaran kekuasaan, dikarenakan mereka memiliki idealisme yang berbasis agama yang cukup kuat.

Dengan hal tersebut, kelompok sebagaimana disebutkan kemudian mengordinasikan diri kedalam gerakan sosial dan bergabung dengan kelompok lain dengan menggunakan Islam sebagai landasan dalam berjuang. Adapun tujuannya yaitu menggulingkan dan menghancurkan tirani rezim politik yang telah membuat mereka termarginalkan.

Menurut Dr. Vedi R Hadiz aksi terorisme yang merupakan dampak dari adanya radikalisme agama diberbagai lini kehidupan merupakan wujud perlawanan kelas yang termarginalkan oleh *oligarki* kelas pemilik modal (borjuasi) dan modal. Subordinasi atas kelas marginal dalam kasus yang terjadi di Indonesia yang dalam hal ini adalah gerakan politik Islam telah membawa kesadaran kelas untuk merebut kembali peran Negara yang telah dianggap gagal dalam mewujudkan kesejahteraan terhadap rakyatnya.

Dari berbagai fenomena yang melatar belakangi terbentuknya radikalisme agama seperti tersebut diatas, penulis menggaris bawahi

bahwa sejatinya keberadaan apa yang kita sebut sebagai Islam radikal yang ada di Indonesia adalah berbeda dengan apa yang terjadi di Timur Tengah, dengan kata lain keterkaitan itu hanya dalam kapasitas kesamaan visi dan persepsi mengenai perubahan sosial dalam kerangka hukum politik Islam. Dengan kata lain kemunculan Islam radikal tidak lagi dipahami dengan Wahabisme atau Islam Transnasional, akan tetapi Islam radikal tidak lebih dari sekedar symbol ketidakpercayaan terhadap rezim otoriter yang berkuasa yang telah membungkam suara rakyat.

### **2.2.3. Proses dan Langkah dalam Deradikalisasi Agama**

Deradikalisasi adalah bagian dari strategi kontra radikal sebagai upaya dalam bentuk langkah strategis maupun taktis untuk memotong seluruh variabel yang dipandang sebagai stimulan lahirnya tindakan "radikalisme" baik yang dilakukan sebelum atau setelahnya.<sup>62</sup>

Radikalisasi agama yang kian menggejala saat ini, adalah tidak bisa terlepas dari apa yang dinamakan dengan "politik identitas". Adanya eksistensi dan gejala imperialisme global melalui sikap Barat, khususnya kebijakan politik Amerika dalam merancang bangun perpolitikan dunia dengan memperlakukan dunia Islam secara hegemonik.

---

<sup>62</sup><http://www.eramuslim.com/berita/analisa/latar-belakang-munculnya-strategi-deradikalisasi.htm>

Dari pengertian di atas, dapat kita fahami bahwa tindak radikalisasi yang bernuansa agama ketika telah menjurus ke dalam hal-hal yang bersifat “anarkis” dan “mengganggu orang lain” sejatinya menjadi hal yang penting untuk diselesaikan secara bersama. Mengingat upaya penanganan deradikalisasi dan deideologisasi merupakan tanggung jawab kolektif, terutama sinergisitas para tokoh agama, kepolisian dan Negara.<sup>63</sup> Dalam hal ini NU Kota Semarang dengan para tokoh agama dan lembaga yang ada di dalamnya menjadi elemen yang sangat mendukung terhadap penanganan deradikalisasi agama yang ada di Kota Semarang.

Mengutip tulisan Affandi Mochtar dengan judul "Deradikalisasi Lunak" yang dimuat di harian *REPUBLIKA*, 16 November 2011, Ahmad Sidqi mengungkapkan, proses deradikalisasi hendaknya dilakukan tidak hanya melibatkan aparat saja, akan tetapi juga harus melibatkan tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga yang ada. Menurutnya strategi deradikalisasi agama yang diterapkan harus mengacu pada tiga langkah strategi yaitu: langkah *prevention* (pencegahan), *rehabilitation* (rehabilitasi), dan *aftercare* (pembinaan pasca pelepasan). Dalam tulisanya “Deradikalisasi Melalui Pesantren”, ia menyebutkan langkah tersebut dapat di aplikasikan sebagai berikut:<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm.43

<sup>64</sup> Ahmad Sidqi, dalam “Deradikalisasi Melalui Pesantren” diakses dari <http://budisansblog.blogspot.com/2011/11/deradikalisasi-berbasis-pesantren.html>

*Pertama*, pencegahan. Hal tersebut dapat dilakukan antara aparat bekerja sama dengan para Ulama' atau Pengasuh Pesantren. Hal tersebut mengingat jumlah pesantren yang banyak di Indonesia, tak terkecuali di Semarang, sehingga memungkinkan mereka dijadikan sebagai aktor utama dalam kampanye deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Karena sebagaimana kita ketahui, Ulama' atau Pengasuh Pesantren itu bukanlah figur yang berdiri sendiri, melainkan dia memiliki jaringan sosial yang cukup luas, sehingga diharapkan di tangan merekalah deradikalisasi agama dapat berjalan dengan apa yang diharapkan.

*Kedua*, rehabilitasi dan pasca pembinaan (*after care*), kiai dengan pesantren yang dimilikinya dinilai sebagai tempat yang cukup strategis bagi rehabilitasi dan pembinaan bagi generasi muda untuk menuntut ilmu dan mengarahkan mereka dari praktik keagamaan yang menyimpang

Perlu kita fahami bahwa deradikalisasi merupakan strategi penanganan kontra radikal. Berdasarkan asumsi tersebut, maka penulis menganggap konsep pribumisasi Islam yang digagas oleh KH. Abdurrahman Wahid, adalah mempunyai nilai-nilai deradikalisasi yang dimaksud. Menurutnya gagasan pribumisasi Islam adalah dimaksudkan untuk mencairkan pola dan karakter Islam sebagai sesuatu yang normatif, praktik keagamaan yang kontestual dan

akomodasi ajaran Islam kedalam nilai-nilai budaya.<sup>65</sup> Oleh Imdadun Rahmat dalam “*Islam Pribumi Mendialogkan Agama Membaca Realitas*”, Syarif mengemukakan lima gagasan dalam pribumusasi Islam yaitu:<sup>66</sup>

*Pertama*, Kontekstual, yaitu Islam dipahami sebagai ajaran yang terkait zaman dan tempat. Ini berarti bahwa Islam adalah suatu agama yang dinamis, terus memperbaharui diri, dan respon terhadap perubahan zaman, serta lentur dan mampu berdialog dengan kondisi masyarakat yang berbeda untuk melakukan adaptasi kritis, sehingga Islam bisa dinilai sebagai ajaran yang *shahih li kulli zaman wa al-makan* (relevan dengan perkembangan zaman dan tempat).

*Kedua*, Toleran, sikap toleran dalam beragama dan toleran terhadap perbedaan penafsiran dapat menumbuhkan kesadaran untuk bersikap. Hal tersebut dikarenakan konteks dan kultur keindonesiaan yang plural, menuntut pula pengakuan tulus bagi kesederajatan terhadap agama-agama lain.

*Ketiga*, Menghargai Tradisi, di sini suatu etika hendaknya mengacu pada zaman Rosul. Islam dibangun di atas penghargaan pada tradisi lama yang baik, karena sesungguhnya Islam tidak memusuhi tradisi lokal melainkan budaya tersebut dijadikan sebagai sarana dakwah Islam. Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Walisongo dalam penyebaran agama Islam di Indonesia.

---

<sup>65</sup> Syarif Hidayatullah, *Islam Isme-isme; Aliran dan Paham Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.50

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.51-52

*Keempat*, Progresif, dengan perubahan terhadap praktik keagamaan dimana ia berada. Islam berarti harus siap dan lapang dada menerima tradisi pemikiran orang lain kendatipun berasal dari Barat. Hal tersebut seperti dicontohkan oleh Rosul dalam haditsNya yaitu “carilah ilmu walau sampai ke negeri China”

*Kelima*, Membebaskan, di sini Islam sebagai suatu agama yang dapat menjawab problematika kemanusiaan yang ada secara universal tanpa membedakan agama dan etnik. Dengan semangat pembebasan tersebut, sebagai agama yang *rahmatan lil ‘alamin* Islam harus siap melawan penindasan, kemiskinan, keterbelakangan, anarki sosial dan lain sebagainya.